

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN DAN KEMISKINAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Arfian

Program Pascasarjana Universitas Haluoleo Kendari

Email: arfianharumi@gmail.com

¹LM. Harafah, ²M. Yani Balaka, ³Hasan Aedy, ⁴Fajar Saranani, ⁵Wali Aya Rumbia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo Kendari

¹Email: harafahprof@gmail.com

²Email: yanibalaka01@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, Pendidikan dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 14 Kabupaten/Kota. Sedangkan periode penelitian selama 5 tahun (2016-2020). Jenis penelitian ini adalah verifikatif dengan pendekatan kuantitatif dalam model regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan Secara simultan jumlah penduduk, pendidikan dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Ketimpangan, data panel

ABSTRACT

Aim of this Study for analyze influence population, education and poverty to inequality income in the Regency /City of Southeast Sulawesi Province , amounting to 14 Regencies /Cities. Whereas period study for 5 years (2016-2020). Type study this is verification with approach quantitative in the panel data regression model. The results showed that the population has not a significant influence on income inequality. Education has a significant effect on income inequality. Poverty has a significant influence on income inequality Simultaneously population and education have a significant effect on income inequality.

Keywords: Inequality, panel data

1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingginya tingkat kemiskinan masyarakat atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (Tambunan, 2015). Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan adalah hal yang nyata yang dihadapi ditengah-tengah masyarakat baik di negara maju maupun Negara berkembang dan merupakan suatu permasalahan penting untuk diatasi.

Ketimpangan atau disparitas antar daerah yang terjadi di Indonesia disebabkan karena masing-masing wilayah mempunyai karakteristik kandungan alam yang berbeda dari segi sumber daya alam maupun dari segi demografi. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan kemampuan masing-masing wilayah untuk mendorong proses pembangunan. Menurut Kuncoro (2010), ketimpangan melekat pada standar hidup yang relatif pada semua orang. Perbedaan ini yang membuat masyarakat suatu wilayah memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda dan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah juga berbeda-beda, sehingga menimbulkan *gap* atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2015).

Pembangunan dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses yang hasilnya bersifat multi dimensional, yaitu meliputi berbagai perubahan atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi pemerintahan dan masyarakat. Selain melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengurangan kemiskinan diperlukan. Masalah kesenjangan perlu menjadi prioritas utama dalam mengambil arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Perbaikan lebih

lanjut harus mengikuti proses peningkatan kualitas kesejahteraan ekonomi penduduk, kualitas penduduk secara keseluruhan. Salah satunya bisa dimulai dengan menaikkan level distribusi pendapatan yang adil antara kelompok ekonomi yang berbeda dalam masyarakat. Jadi, yang diharapkan dalam pembangunan yaitu harus menggambarkan perubahan suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara menyeluruh. Untuk itu, langkah-langkah pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Peran masyarakat yang turut ikut serta dalam pembangunan disuatu wilayah harus diperluas sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tenggara yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,390. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,388. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,389, Gini Ratio Maret 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,001 poin.

Tabel 1

Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara, Maret 2021

Keterangan	Perkotaan	Pedesaan	Sultra
Gini Rasio	0,411	0,347	0,390
Distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah	15,73%	18,71%	16,97%

Sumber: BPS Sultra (2021)

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Rasio di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,411 mengalami kenaikan dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,403 dan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,404. Gini Ratio di daerah pedesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,348 dan September 2020 tercatat sebesar 0,348 mengalami kenaikan sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,347.

Selain Rasio Gini, satu lagi proporsi disparitas yang sering dimanfaatkan adalah tingkat konsumsi pada 40% penduduk yang paling berkurang, yang dikenal sebagai proporsi ketidakseimbangan Bank Dunia. Berdasarkan tindakan ini, tingkat ketidakseimbangan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu tingkat disparitas berada dalam klasifikasi tinggi jika tingkat konsumsi paling sedikit 40% dari populasi di bawah 12%, kelas untuk ketidakseimbangan sedang adalah antara 12-17 persen, dan klasifikasi ketidakseimbangan rendah dengan asumsi jumlahnya di bawah utara sebesar 17%.

Tabel 2

Distribusi Pengeluaran Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), Maret 2020-Maret 2021

Daerah/Tahun	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Terbawah	Total
Perkotaan				
Maret 2020	16,16	37,21	46,63	100
September 2020	16,58	36,14	47,27	100
Maret 2021	15,73	37,36	46,91	100
Perdesaan				
Maret 2020	18,30	39,26	42,44	100
September 2020	18,82	38,64	42,54	100
Maret 2021	18,71	39,54	41,75	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2020	16,63	37,50	45,87	100
September 2020	17,19	36,67	46,14	100
Maret 2021	16,97	37,36	54,67	100

Sumber: BPS Sultra (2021)

Faktor pendidikan memiliki peranan yang berarti dalam menentukan kesenjangan distribusi pendapatan. Persentase pendapatan 40 persen kelompok rumah tangga berpenghasilan sangat rendah mengalami penurunan akibat kenaikan jumlah penduduk yang pernah sekolah. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Menurut Martins & Pereira (2004)

menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak yang positif terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut Sullivan & Smeeding (1997) menyatakan bahwa tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi akan mendapatkan pendapatan yang tinggi sebaliknya pendidikan tenaga kerja yang rendah akan mendapatkan pendapatan yang rendah sehingga sangat mempengaruhi kesenjangan pendapatan di negara-negara maju.

Pertumbuhan penduduk adalah proses perubahan jumlah penduduk serta komposisinya yang dipengaruhi tiga komponen demografi yaitu: fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Hambar Sari & Inggit, 2016). Jadi, pertumbuhan penduduk adalah proses perubahan jumlah penduduk dari periode ke periode selanjutnya dalam suatu wilayah. Penduduk sendiri mempunyai jumlah yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk yang besar akan memberikan suatu keuntungan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi, harus diimbangi dengan kemampuan dan kualitas penduduk mumpuni. Akan tetapi, jika dengan jumlah penduduk yang besar dan kemampuan serta kualitasnya SDM (Sumber Daya Manusia) tidak mumpuni maka bisa menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Menurut marxist, Teori ini mengemukakan bahwa semakin banyak manusia di suatu wilayah maka semakin tinggi produksi yang dihasilkan.

Berdasarkan fenomena dan *gap research* di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul: “Pengaruh Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara”.

2. KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan memiliki arti penting dalam hal pendapatan di antara setiap individu atau keluarga secara lokal dalam suatu ruang. Disparitas adalah sesuatu yang khas dalam perekonomian lokal. Disparitas tersebut disebabkan oleh dua hal, khususnya karena kontrasnya aset normal dan kontras kondisi segmen di setiap kecamatan. Ini menghasilkan di wilayah yang dibuat tambahan dan di wilayah sebaliknya. Disparitas mengacu pada perbandingan cara hidup dengan daerah setempat, karena ketimpangan antar kabupaten adalah perbedaan faktor hadiah yang mendasarinya. Perbedaan yang terjadi menyebabkan tingkat dan siklus perbaikan yang berbeda di setiap bidang. Hal ini membuat lubang atau hole dalam bantuan pemerintah di daerah (Kuncoro, 2010).

Pada dasarnya distribusi pendapatan adalah sebuah gagasan yang mengkaji penyebaran gaji setiap individu atau keluarga di mata publik. Ada dua gagasan utama sehubungan dengan perkiraan alokasi pendapatan, yaitu gagasan tentang ketidakseimbangan langsung dan gagasan tentang disparitas relatif. Gagasan disparitas langsung adalah gagasan memperkirakan ketidakseimbangan yang menggunakan batas dengan harga yang datar. Sedangkan gagasan disparitas relatif adalah gagasan untuk memperkirakan ketidakseimbangan dalam penyampaian upah yang melihat seberapa besar upah yang diterima oleh seorang individu atau kumpulan individu-individu daerah dengan pembayaran lengkap yang diperoleh daerah secara keseluruhan (Sukirno, 2015).

Penduduk

Penduduk adalah orang atau individu sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu (Mantra, 2009). Bailah (2019), mengatakan bahwa penduduk adalah individu yang tinggal menetap di suatu wilayah paling sedikit selama enam bulan atau kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Hartono (2007), menjelaskan bahwa penduduk merupakan setiap masyarakat atau orang yang tinggal di suatu wilayah dengan kesepakatan tertentu (syarat yang telah dipenuhi).

Sementara itu, menurut BPS (2021), penduduk adalah semua masyarakat yang menempati suatu tempat di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang menetap kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2021), penduduk adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dan sebagainya)

Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan kualitas manusia. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah suatu pekerjaan yang disadari dan diatur untuk menciptakan iklim belajar dan pengalaman pendidikan sehingga siswa secara efektif

menumbuhkan kemampuan mereka untuk memiliki kekuatan, ketenangan, karakter, pengetahuan, orang yang terhormat, dan kemampuan yang diperlukan tanpa bantuan orang lain, masyarakat, negara dan negara.

Menurut Subroto & Yudiana (2010) menjelaskan bahwa pada umumnya Pendidikan adalah suatucara paling umum untuk membantu, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memberdayakan orang untuk berkembang dan berkreasi sesuai fase progresif, dengan tujuan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di masa sekarang dan di kemudian hari.. Tujuan utama Pendidikan adalah Mengembangkan individu menjadi individu-individu yang kreatif, berdaya-cipta, dan yang dapat menemukan *discover*.

Kemiskinan

Sementara itu, BPS untuk mengkuantifikasi kemiskinan menggunakan gagasan tentang kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar (pendekatan kebutuhan esensial). Dengan metodologi ini, kemelaratan dipandang sebagai ketidakberdayaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan non pangan yang diperkirakan dari sisi penggunaan. Jadi penduduk miskin adalah individu yang rata-rata penggunaan per kapita dari bulan ke bulan berada di bawah garis kebutuhan (BPS, 2021).

Hubungan antara Jumlah penduduk dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut J hingan (2014) ada tiga ciri utama Negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, kerangka instruktif yang kurang, menyebabkan banyak orang bodoh dan tidak adanya kemampuan dan bakat. Merek berikutnya adalah kelemahan kronis kantor dan desain pemanfaatan sehingga hanya sebagian kecil dari penduduk yang dapat menjadi pekerja yang berguna dan yang ketiga adalah bahwa penduduk dikumpulkan di kawasan hortikultura dan pertambangan dengan strategi penciptaan yang usang dan usang.

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan.

Sesuai (Arsyad, 2010), bahwa pembangunan kependudukan biasanya memicu munculnya berbagai masalah seperti pembangunan usia muda, meningkatnya jumlah pengangguran, urbanisasi, dll. Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan perbaikan di Indonesia merupakan contoh angkutan penduduk dan keserbagunaan kerja yang kurang disesuaikan, baik yang jauh antar pulau, antar teritorial, maupun antar wilayah pedesaan dan metropolitan serta antar wilayah.

Hubungan antara pendidikan dengan Ketimpangan Pendapatan

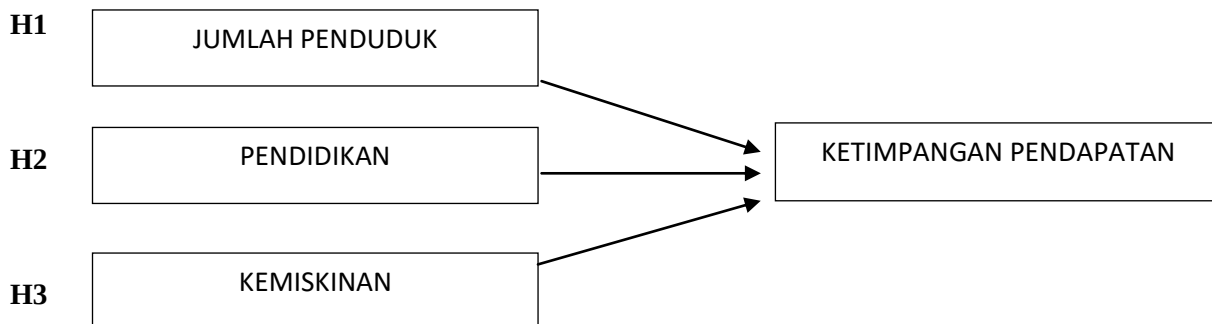
Pekerja dengan pendidikan tinggi akan mendapatkan gaji besar. Kemudian lagi, buruh yang memiliki instruksi rendah akan mendapatkan upah yang lebih rendah atau rendah. Selain upah normal yang rendah, buruh dengan tingkat pendidikan rendah juga menghadapi tantangan yang lebih berat karena perkembangan gaji mereka umumnya lebih lambat (basi) dibandingkan dengan perkembangan upah buruh dengan pendidikan tinggi (ILO, 2015). Hal ini sangat memprihatinkan karena secara tidak langsung dapat dianggap bahwa sebagian besar perkembangan upah mampu dilakukan oleh angkatan kerja.

Hubungan antara Kemiskinan dengan Ketimpangan Pendapatan

Menurut J hingan (2014), ada tiga ciri utama Negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana pendidikan yang tidak memenuhi standar sehingga menyebabkan tingginya penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian. Ciri kedua, fasilitas kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa menjadi tenaga kerja produktif, dan ketiga adalah penduduk bekerja di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang sangat tidak memadai dan ketinggalan zaman.

Kesenjangan (*inequality*) merupakan isulain yang sering dikaitkan dengan kemiskinan. Barber (2008) mengemukakan hubungan antara ketidakseimbangan dan kemelaratan sebagai hubungan yang bumi, lebih spesifiknya disparitas membuat kemelaratan memburuk atau ketidakseimbangan adalah jenis kemelaratan.

Kerangka Konsep



Hipotesis Penelitian :

H1 : Jumlah penduduk berpengaruh Signifikan Positif terhadap Ketimpangan Pendapatan

H2 : Pendidikan Berpengaruh Signifikan negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan

H3 : Kemiskinan Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Ketimpangan Pendapatan

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jika ditinjau dari metode analisisnya, dimana penelitian ini dianalisis untuk pengaruh jumlah penduduk dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian verifikatif. Menurut Sugiyono (2014) penelitian verifikatif merupakan suatu metode penelitian yang ditunjuk untuk menguji teori yang digunakan dan penelitian ini akan mencoba menghasilkan informasi ilmiah baru yaitu status hipotesis yang merupakan kesimpulan apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi 17 (dua belas) Kabupaten/Kota yang datanya terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 5 Tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan.

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis informasi yang dapat diperkirakan atau ditentukan secara langsung, sebagai data atau klarifikasi yang dikomunikasikan dalam angka atau angka. (Sugiyono, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2014), data sekunder diperoleh dari sumber pendukung (pihak lain), atau tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data dalam bentuk laporan yang telah tersedia yang tidak perlu diolah lebih lanjut (Sugiyono, 2014). Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara.

Teknik Pengumpulan data

Dalam tinjauan ini, strategi pemilihan informasi yang digunakan oleh para ilmuwan adalah dokumentasi. Dokumentasi menurut Arikunto (2016) adalah strategi yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data berupa buku, babad, catatan, angka-angka yang tersusun dan gambar-gambar sebagai laporan dan data yang dapat menunjang penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dalam bentuk laporan publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan eviews 7 dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y= Gini Rasio

α = Konstanta

β = Koefisien regresi masing-masing variabel independent

X1= Jumlah Penduduk

X2= Pendidikan

X3=Kemiskinan

ε = Measurement error

t= Waktu

I = Kabupaten/Kota

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Adapun hasil analisis deskriptif masing masing dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.
Statistik Deskriptif

	Y?	X1?	X2?	X3?
Mean	0.369537	6.436124	0.644469	19722.00
Median	0.370000	5.665975	0.626056	19105.00
Maximum	0.470000	14.52378	0.868333	38140.00
Minimum	0.300050	1.265151	0.536389	5700.000
Std. Dev.	0.037058	3.659986	0.071685	9306.710
Skewness	0.572382	0.529493	1.670586	0.219092
Kurtosis	2.944495	2.367836	5.325569	1.891198
Jarque-Bera	3.831236	4.436490	48.33415	4.145888
Probability	0.147251	0.108800	0.000000	0.125815
Sum	25.86756	450.5287	45.11283	1380540.
Sum Sq. Dev.	0.094757	924.2891	0.354570	5.98E+09
Observations	70	70	70	70
Cross sections	14	14	14	14

Sumber : Olahan Eviews

Berdasarkan Tabel 3 Variabel Ketimpangan Pendapatan (Y) menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 0.369537 di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya nilai maksimum (tertinggi) sebesar 0.470000 nilai minimum (terendah) sebesar 0.300050 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.037058.

Variabel Jumlah penduduk (X1) menunjukkan nilai mean(rata-rata) sebesar 6.436124 di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya nilai maksimum (tertinggi) sebesar 14.52378, nilai minimum (terendah) sebesar 1.265151 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.659986.

Variabel Pendidikan (X2) menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 0.644469 di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya nilai maksimum (tertinggi) sebesar 0.868333, nilai minimum (terendah) sebesar 0.536389 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.071685.

Variabel Kemiskinan (X4) menunjukkan nilai mean (rata-rata) sebesar 19722.00 di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya nilai maksimum (tertinggi) sebesar 38140.00, nilai minimum (terendah) sebesar 5700.000 dengan nilai standar deviasi sebesar 9306.710.

Pemilihan Model data Panel dan Penentuan model Estimasi

Dalam menentukan model mana yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan uji pemilihan model. Penentuan model estimasi antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) dilakukan dengan Uji Chow. Berikut ini hasil penentuan model dengan Uji Chow:

Tabel 4.
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.795096	(13,53)	0.0000

Sumber : Olahan Eviews

Tabel 4. menunjukan Uji Chow memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai kritis 0,05 yang memberikan keputusan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih baik dari pada common Effect Model (CEM). Setelah Fixed Effect Model yang terpilih dalam Uji Chow, maka harus dilakukan uji penentuan selanjutnya yaitu Uji Hausman untuk mengetahui model mana yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Berikut ini hasil penentuan model dengan Uji Hausman:

Tabel 5.
Uji Hausmen

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.247694	3	0.0412

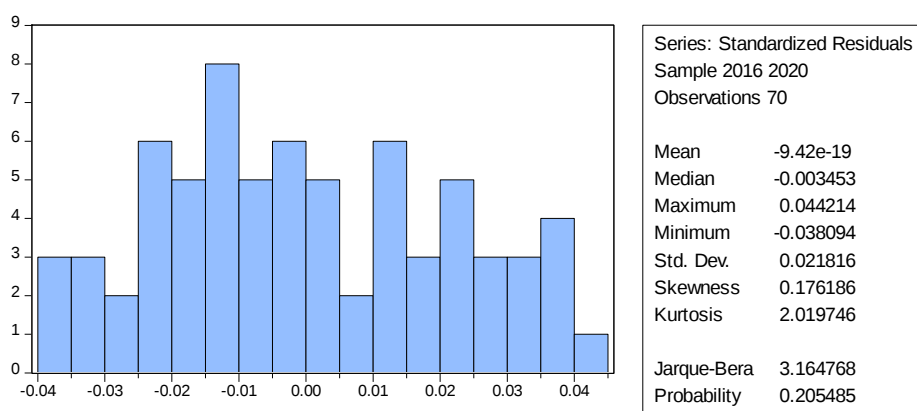
Sumber : Olahan Eviews

Dari tampilan Tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai probability cross- section random sebesar 0.0412 yang nilainya < 0.05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model Fixed effect lebih baik jika dibandingkan dengan model Random effect. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji distribusi normal merupakan syarat untuk semua uji statistik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya uji *Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal.



Sumber : Olahan Eviews

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas $0.205485 > 0.05$ maka dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Menurut Gujarati (2013), jika terdapat koefisien korelasi antar variabel bebas > 0.8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi < 0.8 maka model bebas dari multikolinearitas.

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.476485	0.685018
X2	0.476485	1.000000	-0.180837
X3	0.685018	-0.180837	1.000000

Sumber : Olahan Eviews

Berdasarkan hasil pada Tabel 5 dapat dilihat semua korelasi antara variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0.8. Artinya pada model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas atau dalam model ini tidak adanya korelasi antara variabel independen.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Hasil ringkasan analisis regresi data panel dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.303842	0.405217	3.217637	0.0022
X1	-0.003219	0.011835	-0.272028	0.7867
X2	-0.369004	0.161054	-2.291184	0.0260
LOG(X3)	-0.069240	0.033151	-2.088608	0.0416

Sumber : Olahan Eviews

$$Y = 1.303842 - 0.003219X1 - 0.369004X2 - 0.069240X3$$

Keterangan :

- Y = Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)
X1 = Jumlah Penduduk (Persentase jumlah penduduk)
X2 = Pendidikan (Indeks Pendidikan)
X3 = Kemiskinan (Jumlah Penduduk Miskin)

Selanjutnya masuk pada persamaan regresi yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Koefisien regresi variabel jumlah penduduk sebesar -0.003219 artinya terjadi hubungan yang negatif antara penduduk dan ketimpangan pendapatan artinya jika penduduk mengalami kenaikan satu satuan, maka Ketimpangan Pendapatan mengalami pengurangan sebesar -0.003219 satuan dengan asumsi variabel independent lainnya bernilai tetap. 2). Koefisien regresi variabel pendidikan sebesar -0.369004 artinya terjadi hubungan yang negatif antara pendidikan dan ketimpangan pendapatan artinya jika pendidikan mengalami kenaikan satu satuan maka, ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan sebesar -0.369004 satuan dengan asumsi variable independen lainnya bernilai tetap. 3) Koefisien regresi variabel Kemiskinan sebesar -0.069240 artinya terjadi hubungan yang negatif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan artinya jika kemiskinan mengalami kenaikan satu satuan maka, ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar -0.069240 satuan dengan asumsi variable independen lainnya bernilai tetap.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi koefisien regresi secara simultan (uji F), selanjutnya uji koefisien determinasi dengan melihat nilai Adjusted R² dan uji signifikansi koefisien regresi secara parsial (uji t). Hasil pengujian statistik dari uji F, koefisien determinasi dan uji t, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Pengujian Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.303842	0.405217	3.217637	0.0022
X1	-0.003219	0.011835	-0.272028	0.7867
X2	-0.369004	0.161054	-2.291184	0.0260
LOG(X3)	-0.069240	0.033151	-2.088608	0.0416
R-squared	0.919976	Mean dependent var		0.515167
Adjusted R-squared	0.895818	S.D. dependent var		0.457659
S.E. of regression	0.024893	Sum Square resid		0.032841
F-statistic	38.08152	Durbin-Watson Stat		2.353665
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Olahan Eviews

Uji Koefisien Determinasi R Squared (R)

Tabel 10 menunjukkan nilai R Squared sebesar 0,9199796 atau 91%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pendidikan dan kemiskinan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Ketimpangan pendapatan di Provinsi Tenggara Tahun 2016-2020 sebesar 91%. Sedangkan sisanya 100%-91% =9% dipengaruhi variabel lain diluar model atau tidak diteliti.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 8 diperoleh signifikansi sebesar 0.00000 lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,00 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk, pendidikan dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi, jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikansi hasil lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 1 ditolak.

Dari hasil estimasi, didapatkan hasilnya t-hitung variabel X1 sebesar -0.272028 dan jika dilihat dari besarnya nilai probabilitas pendidikan yaitu 0.7867. Sehingga probabilitas jumlah penduduk lebih besar dari α 5% ($0.7867 > 0,05$) maka variabel Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan koefisien sebesar --0.003219. Dengan demikian hipotesis 1 ditolak.

Dari hasil estimasi, didapatkan hasilnya t-hitung variabel X2 sebesar -2.291184 dan jika dilihat dari besarnya nilai probabilitas pendidikan yaitu 0.0260. Sehingga probabilitas pendidikan lebih kecil dari α 5% ($0.0260 < 0,05$) maka variabel pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan koefisien sebesar -0.369004. Dengan Demikian Hipotesis 2 diterima.

Dari hasil estimasi, didapatkan hasilnya t-hitung variabel X3 sebesar -2.088608 dan jika dilihat dari besarnya nilai probabilitas kemiskinan yaitu 0.0416. Sehingga probabilitas Kemiskinan lebih kecil dari α 5% ($0.0416 > 0,05$) maka variabel Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan dengan koefisien sebesar -0.069240. Dengan Demikian Hipotesis 3 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil uji hipotesis parsial diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut sesuai dengan hasil kajian empirik sebelumnya yaitu Nadhifah & Wibowo (2021) dan Triarsa & Purbadharmaja (2021) yang mengatakan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan.

Hal ini terlihat dari persentase jumlah penduduk periode 2016-2020 diprovinsi sulawesi tenggara wilayah yang persentase jumlah penduduknya rendah seperti Kabupaten Buton dengan persentase jumlah penduduk sebesar 4,4 persen dan memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi yaitu sebesar 0,47. Artinya ada beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi tenggara yang memiliki persentase jumlah penduduk yang masih rendah sehingga mobilitas tenaga kerja kurang seimbang yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil uji hipotesis parsial diketahui bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut sesuai dengan hasil kajian empirik sebelumnya yaitu Hindun et al. (2019) dan (Coady & Dizioli, 2017) yang mengatakan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan telah banyak dianalisis dalam literatur ekonomi tenaga kerja. Analisis tersebut terkait dengan hasil pungutan sekolah yang telah ditimbulkan dengan bayaran yang didapat. Untuk situasi ini, pelatihan yang dilakukan oleh seorang individu dapat menentukan gaji yang dia dapatkan. Selanjutnya, berkonsentrasi pada sekolah dan gaji merupakan data penting bagi pencipta strategi, baik publik maupun swasta, untuk memutuskan berapa banyak spekulasi yang diperlukan di bidang ini. (Wahyuni & Monika, 2016). Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri seseorang, semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, maka kemungkinan akan semakin tinggi pula kualitas diri yang dimiliki orang tersebut. Apabila pendidikan seseorang masih rendah, maka kualitas diri orang tersebut pun akan rendah, sedangkan banyak perusahaan-perusahaan akan memberi gaji tinggi kepada karyawannya yang memiliki kualitas yang bagus dan terpelajar. Maka dari itu, pendidikan menjadi salah satu faktor mengapa masih ada ketimpangan pendapatan yang ada di suatu daerah/wilayah. Ketika suatu daerah/wilayah masih tergolong rendah tingkat pendidikannya maka tidak mungkin bila ketimpangan pendapatan akan turun bila masih ada ketimpangan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini terlihat dari indeks pendidikan periode 2016-2020 diprovinsi sulawesi tenggara hanya terpusat dari 2 wilayah saja yaitu Kota Kendari dengan indeks pendidikan sebesar 0,86 poin dan Kota Baubau sebesar 0,77 poin. Artinya ada beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi tenggara yang memiliki indeks pendidikan yang rendah sehingga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil uji hipotesis parsial diketahui bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hasil kajian empirik sebelumnya yaitu Andiny & Mandasari (2017), Rohani & Jusman (2021), dan Roope (2021) yang mengatakan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Salah satu definisi pertama tentang kemiskinan adalah yang dirumuskan oleh Seebohm Rowntree pada tahun 1901 (Viet-Wilson, 1986), yang menyatakan bahwa suatu keluarga termasuk dalam kemiskinan primer jika keseluruhan pendapatannya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan minimum untuk kebutuhan fisik/tubuhnya (yaitu konsumsi pangan).

Kesenjangan (inequality) merupakan isu lain yang sering dikaitkan dengan kemiskinan. Hubungan yang erat antara kesenjangan dan kemiskinan adalah bahwa kesenjangan merupakan bagian dari kemiskinan. Hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan (Annim et al., 2012). Pada tulisannya Rodriguez-Paso & Hardy (2015) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan dengan kesenjangan, baik yang sifatnya spasial maupun inter-personal. Lebih lanjut dinyatakan hubungan ini lebih kuat antara kesenjangan antar individu (interpersonal) dengan kemiskinan dibandingkan dengan kesenjangan spasial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut (1) Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. (2) Pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengaruh pendidikan

terhadap ketimpangan pendapatan telah banyak dianalisis dalam literatur ekonomi tenaga kerja. Analisis tersebut terkait dengan pengembalian (pay-off) biaya sekolah yang telah dikeluarkan dengan pendapatan yang diterima. Dalam hal ini, pendidikan yang dicapai seseorang bisa menentukan pendapatan yang diterimanya.

Saran

(1) Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan sebaiknya pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara membuat strategi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif, khususnya dalam aspek pemerataan penyebaran penduduk dan pemerataan pendidikan dan aspek penurunan kemiskinan. (2) Dalam penelitian ini ketimpangan pendapatan diukur dengan menggunakan gini ratio. Untuk penelitian selanjutnya memungkinkan untuk menggunakan ukuran ketimpangan pendapatan lainnya seperti indeks *Williamson* dan indeks *theil*. (3) Perlu adanya penelitian lanjutan, seperti penambahan periode waktu dan juga unit analisis antar daerah misalnya. Selain itu modifikasi model penelitian dengan memasukkan variabel investasi dan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur atau lainnya. Mengingat variabel-variabel tersebut cukup berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M., & Samosir, O. B. (2018). *Dasar-dasar Demografi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Almeida, V., Barrios, S., Christi, M., De Poli, S., Tumino, A., & van der Wielen, W. (2021). *the Impact of COVID-19 on Households' Income in the EU. The Journal of Economic Inequality*, 1-19. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10888-021-09485-8>
- Angelov, N., & Waldenstrom, D. (2021). *Income inequality during the Covid-19 pandemic. Research-based policy analysis and commentary from leading economists* (13 August 2021). <https://voxeu.org/article/income-inequality-during-covid-19-pandemic> (Diakses 28 September 2021).
- Ansofino., Jolianis., Yolamalinda., & Arfilindo, H. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barber, C. (2008). *Notes on Poverty and Inequality*, Oxfam International 2008.
- Coady, D., & Dizioli, A. (2017). *Income Inequality and Education Revisited: Persistence, Endogeneity, and Heterogeneity*. IMF Working Paper, WP/17/126, 1-22.
- Hindun., Soejoto, A., & Hariyati. (2019). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(3), 250-265.
- Musfidar, M. (2012). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan tahun 2001-2010*. Universitas Hasanuddin.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: LPFEUI.
- Nadhifah, T., & Wibowo, M. G. (2021). *Determinan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 39-52.
- Roope, L. S. J. (2021). *First estimates of inequality benchmark incomes for a range of countries*. *PLoS ONE* 16(3): e0248178. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248178>
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taresh, A. A., Sari, D. W., & Purwono, R. (2021). *Analysis of the Relationship Between Income Inequality and Social Variables: Evidence from Indonesia*. *Economics and Sociology*, 14(1), 103-119.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan. Edisi Sebelas. Jakarta: Erlangga.
- Triarsa, I. G. N. B., & Purbadarmaja, I. B. P. (2021). *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali dan Faktor Yang Mempengaruhi*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(6), 2632-2660.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Verberi, C., & Yasar, S. (2021). *The Effects of Social Spending on Income Inequality in 30 OECD Countries*. *Istanbul Iktisat Dergisi - Istanbul Journal of Economics*, 71(1), 39-57.